

Konstruksi Teks Pada Media Kompas dalam Pemberitaan Kasus Setyanovanto

Sri Rahayu

Pascasarjana Ilmu Komunikasi - Universitas Diponegoro

onyoxsrirahayu@gmail.com

Abstract

The news about e-KTP corruption has attracted public attention thanks to the role of media that continually publish the case. This paper tries to explain the news of alleged corruption cases involving Setyanovanto, especially in Kompas media, using framing analysis. By analysing several articles in Kompas media, this study concludes that news framing can construct public perception. The inappropriate process of framing the news on detailed content descriptions can further confuse the public. Thus according to the framing analysis, which is derived from the theory of social construction, the reality of news has not fulfilled the three aspects namely aspect of social, aspects of construction, aspects of reality.

Keywords: *framing, e-ktp corruption, text construction, media*

Abstrak

Pemberitaan tentang kasus korupsi e-KTP telah mengundang perhatian publik. Hal ini tidak lepas dari peran media yang secara terus-menerus memberitakan kasus tersebut. Paper ini mencoba menjelaskan pemberitaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Setyanovanto tersebut, khususnya di media Kompas, dengan menggunakan analisis framing. Dengan menelusuri beberapa artikel di media Kompas, studi ini menyimpulkan bahwa framing berita dapat mengkonstruksi persepsi publik. Proses pembingkaiian berita yang kurang sesuai pada penjelasan isi berita yang terperinci

dapat semakin membingungkan masyarakat. Dengan demikian menurut analisis framing, yang merupakan turunan dari teori konstruksi sosial, realitas berita belum memenuhi tiga aspek yaitu aspek sosial, aspek konstruksi, aspek realitas.

Kata kunci: *framing, korupsi e-ktip, konstruksi teks, media*

Latar Belakang

Proyek kartu e-KTP adalah program nasional untuk meningkatkan sistem data kependudukan di Indonesia. Program e-KTP menjamin ketunggalan identitas nasional dan menghindari kartu identitas palsu. Pembuatan e-KTP juga memfasilitasi validasi data publik, memastikan efektivitas dan efisiensi dalam layanan publik. Misalnya, memfasilitasi penyediaan jaminan sosial, serta memastikan bahwa bantuan pemerintah kepada kaum miskin dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pembuatan e-KTP dapat menjamin validasi dan akurasi data pemilih dalam pemilihan umum. Ketunggalan data dapat mencegah kecurangan pemilu. Manfaat lainnya, kartu E-KTP dapat digunakan untuk menegakkan undang-undang dan melacak identitas penjahat dalam waktu yang relatif cepat. Di bidang pemberantasan korupsi, e-KTP merupakan langkah strategis untuk mencegah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan aset dan pencucian uang.

Namun, ada konspirasi dalam niat baik tersebut. KPK membutuhkan waktu empat tahun untuk melepaskan benang kusut dalam kasus ini. Proses ini berjalan dalam dua periode kepemimpinan KPK. Ketika akhirnya niat baik ini juga merupakan dorongan yang digunakan oleh beberapa pihak untuk meningkatkan kerja KPK. Proyek e-KTP sekarang telah menjadi kasus paling populer dalam berita. Publik telah menjadi bagian dari proses kasus kartu E-KTP yang menjebak Setya Novanto, yang oleh berita itu, namanya menjadi cukup viral di masyarakat. Ini, tentu saja, karena liputan yang terus menerus atas kasus ini di media.

Ketika berbicara tentang media massa, istilah "media massa" pada awalnya dikenal sebagai pers yang berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti "pers". Secara harfiah, pers berarti mencetak, dan secara maknawiah berarti publikasi cetak atau cetak (print publications). Dalam perkembangannya, pers memiliki dua arti, pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers, dalam arti luasnya, mencakup semua publikasi, termasuk sarana komunikasi elektronik, penyiaran radio, dan televisi. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada media cetak, yaitu surat kabar, majalah dan buletin (Effendy & Thun Surjaman, 2002, p.144).

Media juga merupakan alat dalam proses komunikasi massa, karena media massa dapat menjangkau publik yang lebih luas, relatif lebih heterogen, dan pesannya tersebar. Media itu sendiri dalam studi komunikasi massa diatur untuk berkomunikasi secara terbuka kepada khalayak yang besar dalam waktu yang relatif singkat (McQuail, 2000, p.17).

Ini berarti bahwa media harus bebas dari tekanan, termasuk tekanan ekonomi. Hal ini tentu masih jauh dari konteks media massa sebagai media kampanye di Indonesia. Tujuan ekonomi lebih kuat daripada kepentingan publik, atau secara singkat sarana informasi publik. Dalam hal ini, makna informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam format yang berguna bagi penerima yang menggambarkan peristiwa nyata dan dapat digunakan sebagai alat untuk membantu membuat keputusan yang memiliki nilai berita.

Kemajuan teknologi informasi memiliki dampak langsung di era keterbukaan. Hari ini semua orang dapat menerima informasi secara instan dan lebih cepat dari sebelumnya. Keterbukaan membuat masyarakat tampak berada di dunia tanpa batas, baik dari dimensi waktu, wilayah, profesi, agama, norma, realitas, bahkan batas-batas moral. Penyebarluasan informasi telah menjadi alat penting dalam sistem demokrasi dan di era keterbukaan pemerintah. McLuhan menyatakan, "*Kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi... dan peralatan untuk*

berkomunikasi yang kita gunakan itu akhirnya membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita sendiri” (Nurudin, 2007, pp. 184-185).

UU no. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) telah menetapkan aspek kebebasan informasi. Khususnya untuk menjamin dan melembagakan hak masyarakat untuk mengakses informasi tentang pemerintahan di semua tingkat birokrasi. Tujuan dari lembaga kebebasan informasi ini adalah untuk membentuk dan mempromosikan tata kelola yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Untuk mencapai tujuan tersebut, jelas bahwa persyaratan pers yang bebas, independen dan profesional diperlukan.

Tetapi saat ini, sebagian besar informasi publik tidak tersedia, meskipun informasinya mendesak untuk disajikan kepada publik. Terkadang informasi diberikan kehilangan relevansi dan nilai, padahal jurnalisme menuntut kecepatan penyampaian informasi (Suyono, 2012). Sementara itu, UU Pers hanya mengakui hak media untuk mencari, memproses dan menyebarkan informasi, tapi tidak mengatur kewajiban narasumber, khususnya pejabat publik untuk memberikan informasi publik kepada wartawan. UU Pers tidak mengatur pertukaran informasi, biaya akses, personel layanan informasi, klasifikasi informasi dan jenis sarana penyampaian informasi publik lainnya.

Masyarakat tentu berharap memiliki hak untuk mengakses informasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Realitas dapat dibangun dan ditafsirkan secara berbeda dengan cara lain. Hasil konstruksi media akan memiliki dampak yang besar pada penonton. Media adalah tempat di mana khalayak mendapatkan informasi tentang realitas yang terjadi di sekitar mereka. Karena itu, konstruksi media akan mempengaruhi fenomena tersebut. Seperti dikutip oleh Eriyanto dari W. Lance Bennet, Regina G. Lawrence dalam bukunya " Analisis Framing" menyatakan bahwa peristiwa adalah ikon berita. Apa yang diketahui publik tentang realitas di sekitar mereka tergantung pada bagaimana media menggambarkannya. Publik akan sangat

mengingat sebuah ikon yang disisipkan oleh media sebagai gambaran dari suatu kenyataan.

Yang kedua adalah mobilisasi. Media Massa adalah alat yang sangat kuat untuk menarik. Publik dan publik dengan opini publik. Cara media membuat konstruksi dapat memberikan audiens yang berbeda dengan pemahaman tentang realitas yang sama. Oleh karena itu, media dapat dilihat sebagai tempat yang saling terkait dari kepentingan bersama para manajer. Bahwa dalam setengah, setengah dari permainan menjadi arena untuk membangun satu sama lain dan membangun realitas sesuai dengan minat mereka. Konstruksi dapat digunakan untuk merekam peristiwa yang merupakan pengalaman yang mencari perhatian dari publik (Eriyanto, 2006, p.21). Beberapa insiden ciuman kontroversial dan bahkan sensitif menjadi lebih sering di massa rata-rata Indonesia. Tetapi jika kasus-kasus yang diungkapkan oleh setengah dari massa ini dapat bersifat parsial, tidak ada fokus yang pasti pada pemberitaan media, bahkan tanpa hasil akhir.

E-KTP adalah salah satu kasus besar di Indonesia yang masih merupakan daftar orang-orang yang memberikan setengah massa. Proyek E-KTP dimulai sekitar masa masa berkuasa Joko Widodo, yang difilmkan tak lama sebelum jabaras massal berakhir dengan desas-desus korupsi. Pada waktu itu, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman menjadi terdakwa. Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (2017/09/03), dikatakan bahwa Novanto memiliki peran dalam mengatur anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 miliar (Kompas, 2017). Kasus ini semakin menyita respon masyarakat karena melibatkan beberapa politisi aktif atau beberapa anggota DPR. Termasuk dalam kasus kartu E-KTP yang memiliki jumlah kepala daerah atau Gubernur

Jawa Tengah, misalnya. Nilai nominal korupsi jauh lebih tinggi, bahkan lebih, sehingga masyarakat tidak dapat melewatkan pemberitaan seperti ini.

Sayangnya, kasus ini tidak diimbangi dengan penyesuaian agenda media di Indonesia. Banyak media yang menjadi tameng bagi mereka yang bermain politik. Kompas dan Jawa Pos dan surat kabar lain tentu saja memiliki kriteria sendiri untuk mengungkap kasus ini melalui ruang publik. Kedua media ini memiliki karakter yang sangat berbeda dalam segmentasi untuk pembacanya. Kompas yang khas dengan bahasa kritis belum tentu terbuka ketika sebuah kasus besar terjadi. Sementara Jawa Pos, yang cenderung memiliki bahasa yang mudah dipahami, masyarakat juga memosisikan hal yang sama dengan media lainnya.

Namun dibalik semua ini, media telah memiliki peran sebagai pembawa pesan sehingga pembaca memiliki peran penting dalam membentuk citra berita yang bervariasi. Misalnya, keterbukaan dalam kasus hamabalang dan E-KTP. Murray Edelman mengungkapkan bahwa kenyataan yang dipahami oleh publik adalah realitas yang telah dipilih. Penonton didikte untuk memahami realitas dengan cara tertentu. Media adalah subjek yang memilih dan membingkai realitas. Cara di mana media memilih, bingkai dan membangun adalah apa yang dipahami dengan analisis framing. Framing berhubungan dengan opini publik, karena suatu masalah ketika dikemas dengan kerangka tertentu dapat menyebabkan pemahaman berbeda. Dalam hal ini, misalnya, persepsi orang tentang kasus E-KTP akan berbeda sesuai dengan media yang mengirimkan informasi kepada mereka. Sudut pandang masalah juga akan berbeda karena perspektif setiap masyarakat individu berbeda. Akibatnya, solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak akan berbeda. Tulisan ini mencoba memberikan analisis framing dalam kasus E-KTP di media khusus Kompas. Kemudian, berdasarkan latar belakang yang terekspos, fokus diskusi dari tulisan ini adalah untuk memberikan pertanyaan penting tentang bagaimana konstruksi Kompas dalam kasus kartu E-KTP.

Tinjauan pustaka

Komunikasi Massa

Definisi komunikasi massa, mengacu pada pendapat Tan dan Wright, adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, dalam jumlah besar, sekalipun jarak jauh (terpencar), sangat heterogen dan menghasilkan efek tertentu (Ardianto, 2004, p.3). Menurut Bittner, komunikasi massa adalah penyampaian pesan, informasi, ide dan sikap kepada beragam komunikan dalam jumlah besar menggunakan media massa. Dari definisi ini, jelaslah bahwa komunikasi massa harus menggunakan media massa. Jadi jika komunikasi dapat disampaikan kepada khalayak banyak, seperti demonstrasi yang diikuti dan disaksikan oleh puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan media, maka itu bukan komunikasi massa.

Pakar komunikasi lain, Joseph A. Devito, memformulasikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada sejumlah besar audiens. Dia juga mengatakan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan melalui pemancar audio dan visual (Effendy, 2000, p.21). Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa menyebarkan pesan melalui penggunaan sarana komunikasi modern yang ditujukan pada massa yang bisa jadi acak, tidak tampak oleh si penyampai informasi, seperti pembaca surat kabar, pendengar radio, pemirsa televisi dan film.

Media baru

Mempelajari komunikasi massa tidak berguna tanpa menghubungkan peran medianya. Dapat dikatakan bahwa media massa adalah alat utama dalam proses komunikasi massa. Menurut Mc Luhan, media hanya dapat memiliki konten ketika media digunakan dan dikonjungsikan dengan media

lain. Ia mendefinisikan sarana dalam hubungannya dengan indra manusia. Luhman membagi media menjadi dua kategori, media “hot” dan “cool”. Hot media adalah media yang hanya mengandalkan satu indera, misalnya media foto dan radio. Cool media adalah media yang menggunakan lebih dari satu penginderaan, misalnya TV. Munculnya teknologi media menandai awal komunikasi ke dunia yang lebih modern. Kemudian teknologi seperti ini membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi dan politik. Munculnya teknologi media adalah penghubung utama modernitas. Setelah munculnya modernitas, maka muncul postmodernisme. Unsur-unsur postmodernitas meliputi: (1) Munculnya gaya estetika distingtif dalam dunia seni, desain dan arsitektur akibat dari reaksi intelektual atas modernisme; (2) Pengembangan budaya diasosiasikan dengan budaya media.

Media baru didefinisikan sebagai bentuk teknologi yang terkait erat dengan budaya kehidupan publik. Media baru mengubah nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Teknologi tidak hanya memiliki fungsi sebagai sarana atau alat komunikasi, tetapi teknologi memainkan peran aktif dalam proses berfikir dan berperilaku sebagai manusia. Ini karena, pada intinya, setiap teknologi memiliki nilai, ideologi, dan karakternya sendiri. Era modernism adalah era dimana terdapat media yang bersifat pasif yaitu masyarakat yang mengkonsumsi media yang diposisikan hanya sebagai penonton dan hanya bisa menerima begitu saja berbagai bentuk informasi yang diberikan media, seperti halnya social media.

Sarana Konstruksi dan Realitas Sosial

Realitas sosial adalah hasil dari konstruksi sosial dalam proses komunikasi tertentu. Membahas teori konstruksi sosial (social construction), tentu tidak terlepas dari penjelasan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Istilah konstruktivisme mulai terkenal karena tulisan Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya *The Social Construction of Reality*:

A Treatise in The Sociological of Knowledge tahun 1966. Menurut mereka, realitas sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi. Konstruksi sosial tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi penuh dengan kepentingan (Bungin, 2008, p.192). Bagi kaum konstruktivis, realitas (berita) hadir dalam keadaan subyektif. Realitas diciptakan melalui konstruksi, perspektif, dan ideologi jurnalis. Singkatnya, manusia lah yang membentuk citra dunia. Sebuah teks dalam sebuah cerita tidak dapat disamakan sebagai refleksi realitas, tetapi harus dilihat sebagai konstruksi realitas. Substansi teori konstruksi sosial media adalah pada peredaran informasi dengan cepat, sehingga konstruksi sosial berlangsung sangat cepat dan disebarluaskan secara merata. Realitas yang terkonstruksi juga membentuk opini massa, massa cenderung menjadi a priori dan pendapat massa cenderung sinis (Bungin, 2008, p.203). Menurut perspektif ini tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa itu terjadi melalui tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap sebaran kostruksi, tahap pembentukan konstruksi, dan tahap konfirmasi (Bungin, 2008, p. 188- 189). Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, persiapan materi konstruksi. Ada tiga hal penting dalam tahapan ini yakni keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, keberpihakan kepada kepentingan umum. Kedua, tahap distribusi konstruksi. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak secara tepat berdasarkan agenda media. Apa yang disebutkan media sangat mungkin bagi pembaca. Yang ketiga adalah pembangunan realitas. Pembentukan konstruksi berlangsung melalui konstruksi realitas membenaran; kesediaan dikonstruksi oleh media massa; dan sebagai pilihan konsumtif. Tahap keempat adalah proses konfirmasi. Konfirmasi adalah tahap di mana media massa dan penonton memberikan argumen dan tanggung jawab untuk pilihan mereka.

Untuk itu, suatu media harus rajin mencari feedback dari khalayak ramai. Khalayak disini bukanlah orang-orang partai atau ormas pendukung. Media dapat menyatakan diri mereka sebagai "pikiran rakyat". Demokrasi, kebebasan pers, dan kemandirian media memang terkait dengan peran (fungsi) pers masyarakat. Keadaan sosial ekonomi dan politik akan memberikan pengaruh kepada masyarakat (Santana, 2005, p. 82).

Kasus E-KTP: Sebuah Pembahasan tentang Framing Berita

Berdasarkan ketentuan Kode Etik Jurnalistik, kita dapat merumuskan tujuh elemen yang layak dari bentuk pengiriman berita berikut ini sehingga suatu informasi dapat dianggap sebagai produk jurnalistik. Unsur-unsur produk jurnalistik adalah (1) Akurat, yang tidak hanya dilihat oleh ketepatan dalam penyajian data, seperti nama, tanggal atau angka saja. Tetapi harus ada proses verifikasi fakta-fakta yang disajikan. Dalam kasus e-KTP, Novanto mengatakan di pengadilan di Pengadilan Korupsi Jakarta pada hari Senin (12/3/2018). "*Saya baru ingat kembali bahwa Andi menyampaikan, dia telah melakukan pengiriman uang kepada pihak-pihak, di antaranya dia menyuruh Irvanto,*" kata Setya Novanto. (2) Lengkap, adil dan berimbang. Lengkap artinya tidak mengurangi fakta-fakta penting dan menambahkan fakta-fakta tidak relevan yang dapat menyesatkan publik. Sementara adil dan seimbang berarti bahwa seorang wartawan harus menyampaikan fakta-fakta yang benar-benar terjadi dengan proporsi yang masuk akal.

(3) Objektif. Untuk mendapatkan berita yang obyektif, wartawan harus dapat menggunakan metode ilmiah untuk memverifikasi informasi yang mereka peroleh. (4) Ringkas dan jelas. Kemudian, untuk mematuhi elemen ini, berita harus menggunakan bahasa yang efektif dan jelas. (5) Hangat. Suatu berita yang menarik dan penting untuk disampaikan adalah jika belum banyak orang yang mengetahuinya. (6) Unsur ketepatan waktu juga sangat mempengaruhi publik untuk membaca berita yang disampaikan

(Kusumaningrat, 2006, p. 40-48). (7) Keterbukaan informasi, yang terutama berpedoman pada undang-undang keterbukaan informasi.

Pada gilirannya, akuntabilitas pers melampaui kerangka profesionalisme media dan tanggung jawab kemanusiaan. Himpitan antara kepentingan komersial ideologi pers mempersulit publik dalam menentukan warna media yang mereka pilih. Di tengah tren ini, sulit bagi kita untuk menunggu hidangan pers yang bermoral, terutama pers yang berusaha memprioritaskan kepentingan obyektif. Atau pers yang merusak kepentingan kaum tertindas, tetapi bertentangan dengan ideologi media. Media mengkontradiksikan dirinya sebagai institusi kapitalis yang diarahkan pada akumulasi keuntungan dan modal. Karena media harus berorientasi pasar dan responsif terhadap dinamika persaingan pasar, ia berusaha menyajikan produk informasi yang memiliki keunggulan pasar, yaitu informasi politik dan ekonomi. Di sisi lain, media juga sering digunakan sebagai alat atau struktur politik negara yang menyebabkan media berada di garis mainstream negara.

Menurut Smythe, *"...fungsi utama media adalah menciptakan kestabilan segmen khalayak bagi monopoli penjualan pengiklan kapitalis."* Pada dasarnya, media massa adalah lembaga yang menekankan masalah sosial dan politik di masyarakat atau negara, dan mendidik masyarakat dengan informasi yang edukatif dan bahkan meluruskan berbagai masalah sosial bagi pemerintah. Namun, sebuah fenomena baru lahir tentang karakter kuat kapitalisme media dalam proses perkembangan media massa yang telah merambah properti eksklusif modal, yang hanya berurusan dengan profit. Media sebagai lembaga ekonomi, dalam hal ini terkait erat dengan kapitalisme media dan liberalisme media. Media modern sekarang kurang memperhatikan kepentingan sosial, budaya dan bahkan politik, tetapi untuk kepentingan memperoleh manfaat terbesar tanpa memperhatikan publisitas dan informasi positif dan negatif yang dicerna. Ia hanya mengejar dan mencari popularitas latar belakang perusahaan (Nasution, 2009).

Sebelum membahas lebih lanjut tentang berita di harian Kompas dan di Kompas.com, kita perlu mengingat tentang Framing. Analisis Framing adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media membangun realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana media massa memahami dan membingkai peristiwa (Eriyanto, 2007, p.10). Ada dua esensi utama dari framing, yaitu bagaimana peristiwa ditafsirkan dan bagaimana peristiwa ditulis. Analisis framing adalah metode analisis teks, serta analisis konten kuantitatif. Tetapi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam analisis konten kuantitatif yang ditekankan adalah isi pesan / komunikasi teks. Sedangkan fokus analisis framing adalah pembentukan pesan / arti dari teks. Kerangka kerja ini menganalisis bagaimana wartawan dan media membangun pesan teks dan bagaimana menyajikannya kepada audiens. Secara teknis, jurnalis tidak mungkin membingkai seluruh bagian berita. Artinya, hanya sebagian dari peristiwa penting saja yang menjadi tujuan pembingkai. Ia hanya menampilkan bagian penting dari peristiwa yang ingin diketahui oleh publik saja.

Aspek lain adalah peristiwa atau ide yang diberitakan. Menurut Entman, framing berita dilakukan dalam empat cara. Pertama, dalam identifikasi masalah (problem identification), peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif apa atau negative apa. Kedua, identifikasi penyebab masalah (causal interpretation) adalah apa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Ketiga, evaluasi moral (moral evaluation), yaitu evaluasi penyebab masalah. Dan keempat, penanggulangan masalah (treatment recommendation), yang menawarkan cara untuk menangani masalah dan, terkadang, memprediksi hasilnya. Jika, misalnya, seorang jurnalis ingin membingkai berita E-KTP ini, maka harusnya tidak berarti bahwa ia harus melupakan aturan dasar jurnanisme yang paling dasar, seperti nilai berita, berita yang layak dan berita yang bias.

Menurut Abrar, setidaknya ada tiga bagian berita yang dapat menjadi tujuan framing oleh jurnalis, yaitu judul berita utama, focus berita, dan penutup berita. Berita utama menyebar melalui penggunaan teknik empati untuk menciptakan "kepribadian imajiner" dalam diri penonton, misalnya, terjadinya "Wisanggeni" dalam proyek E-KTP. Kemudian, pendekatan berita yang diframing dengan teknik asosiatif, yaitu, menggabungkan kebijakan aktual dengan fokus pemberitaan. Berikutnya adalah kebijakannya. Dengan memasukkan kebijakan ke pusat berita, audien akan menyadari bahwa masih ada barangkali sesuatu yang salah. Selain itu, sampul berita dibingkai oleh penggunaan teknik packing, yang membuat publik tidak dapat menolak untuk membaca berita. Analisis framing dapat dilakukan dengan berbagai fokus dan tujuan. Tentu saja, karena ini terkait dengan berbagai definisi dan ruang lingkup framing itu sendiri cukup kompleks.

Model Analisis Framing

Ada dua rumus atau model tentang perangkat framing yang sekarang sering digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media massa untuk mengemas berita. Pertama, model Pan dan Kosicki merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana Van Dijk. Kedua, model Gamson dan Modigliani. Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki mengoperasionalkan empat dimensi struktural dari teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, tanda hubung, tematik dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk sejenis tema yang menghubungkan unsur-unsur semantik narasi berita ke dalam koherensi global (Sobur, 2006, p. 175). Sementara itu, rumus dan model Gamson dan Modigliani didasarkan pada pendekatan struktural yang melihat representasi media dan artikel berita, yang terdiri dari paket-paket interpretatif yang berisi konstruksi makna tertentu. Di dalam paket ini ada dua struktur, yaitu *core frame* dan *condensing symbols*. Struktur pertama adalah pusat organisasi dari elemen ide yang membantu para

komunikator untuk menunjukkan substansi masalah yang dibahas. Sedangkan struktur kedua berisi dua substruktur, yaitu *frame device* dan *reasoning device*.

Analisis framing ini juga merupakan cara untuk menganalisis teks media untuk melihat bagaimana laporan E-KTP adalah laporan dari surat kabar Kompas yang berkaitan dengan penangkapan dan pemeriksaan Setya Novanto. *Define problems* dalam konstruksi dan keterbukaan Kompas dalam kasus E-KTP menghasilkan *moral judgement* untuk menjelaskan masalah dari banyak dugaan kasus korupsi e-KTP. Ini adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Ini sesuai dengan fakta bahwa framing pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk melihat bagaimana menceritakan sebuah cerita tentang peristiwa tertentu. Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui deskripsi atau tulisan, analisis framing adalah alternatif untuk analisis konten selain analisis konten kuantitatif dominan dan banyak digunakan. Analisis framing menganalisis "bagaimana" pesan atau teks komunikasi. Objeknya menggunakan koran nasional Kompas dalam beberapa edisi dari September 2017 hingga Maret 2018. Topik yang akan dibahas terbatas pada berita di media tersebut tentang keterbukaan pemberitaan E-KTP.

Dalam tabel Framing Pan dan Kerangka Kosicki, dijelaskan bagaimana idealnya jurnalis harus membentuk fakta, skema *headline*, *lead*, latar informasi, sumber, pernyataan, penutup. Kemudian skrip atau cara jurnalis menceritakan peristiwa dan integritas berita 5W + 1H. Kemudian ada *tematik*, yaitu, bagaimana wartawan menulis data, detail, arti kalimat, hubungan antara kalimat, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti paragraf dan proporsi. Kemudian *retori* atau cara wartawan menekankan fakta / *lexicon*.

Tabel 1.1 Tabel Kerangka Framing Pan dan Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSI: Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema	Headline, lead, latar informasi, sumber, pernyataan, penutup
SKRIP: Cara wartawan mengisahkan cerita	2. kelengkapan berita	5W+1H
TEMATIK: Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud Kalimat 5. Hubungan antar kalimat 6. Nominalisasi 7. Koheransi 8. Bentuk Kalimat 9. Kata Ganti	Paragraf, Proporsi
RETORIS: Cara wartawan menekankan fakta	10. Leksikon 11. Gambar 12. Metaphor 13. Pengandaian	Kata, Idiom, gambar/ foto, grafis

Sumber: (Sobur, 2006, p. 176)

Dasar tabel tersebut digunakan untuk membaca di salah satu artikel berita di bawah ini:

JAKARTA, KOMPAS.com – *Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto, mengaku, keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi, ada keterkaitan dengan kasus yang kini dihadapinya. Menurut Novanto, Irvanto diminta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong mengantarkan uang kepada sejumlah pihak. Hal itu dikatakan Novanto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (12/3/2018). "Saya baru ingat kembali bahwa Andi menyampaikan, dia telah melakukan pengiriman uang kepada pihak-pihak, di antaranya dia menyuruh Irvanto," ujar Setya Novanto. (Baca juga: KPK Tetapkan Keponakan Setya Novanto sebagai Tersangka Kasus E-KTP) Menurut Novanto, akhir-akhir ini dia meminta*

keluarganya mendekati Iroanto dan berbicara mengenai hal itu. Hasilnya, Iroanto mengakui diminta Andi mengantarkan uang.

Artikel ini telah ditayangkan di Kompas.com dengan judul "*Menurut Novanto, Keponakannya Disuruh Jadi Kurir Bagi-bagi Uang E-KTP*". Dalam berita ini, ada pernyataan

... itu sudah saya sampaikan kepada penyidik KPK," kata Novanto. KPK sebelumnya menetapkan Iroanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Ia diduga sejak awal mengikuti pengadaan e-KTP melalui perusahaannya, yakni PT Murakabi Sejahtera. Dia juga ikut beberapa kali dalam pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP. Selain itu, menurut KPK, Iroanto diduga mengetahui adanya permintaan fee 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP. Kemudian, Iroanto diduga menerima total 3,5 juta dollar AS.

Artikel lain yang ditulis oleh Abba Gabrillin, ketika artikel berita dibaca menggunakan Marco Framing Pan dan tabel Kosicki, informasi akan ditampilkan kurang lebih sebagai berikut: (1) Sintaksi: judul: "*Setuju Novanto, keponakan berkata jadi utusan Membagi Kartu Identifikasi Uang Elektronik*" skemanya adalah pemberitaan kasus e-KTP Setya novanto yang melibatkan keponakanya. (2) Skrip: integritas 5W + 1H. kurang menjawab pada unsur How, bagaimana proses menjadikan setatus keponakanya sebagai kurir, dan bagaimana penjelasan dari pihak keponakanya, pada pemberitaan yang dikutip ini, pernyataan tersebut tidak terjawab. (3) Tematik: paragraf dan porsi cukup, hanya untuk melihat dengan sumber daya tautan yang detail tidak termasuk kategori informasi terstruktur dan terperinci. (4) Retorika: bagaimana wartawan dalam menentukan fakta dan bukti, serta banyak pilihan gambar bahasa, kalimat penjelas dan lain-lain bahkan kurang untuk menjelaskan bagaimana berita serial pada gilirannya harus mengacu pada standar KEJ.

Kembali ke UU no. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Undang-undang mengatur aspek kebebasan informasi untuk menjamin

dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi informasi pemerintah di semua tingkat birokrasi. Tujuan melembagakan prinsip kebebasan informasi adalah untuk membentuk dan mempromosikan *good and clean governance*. Pemberitaan ini belum sesuai dengan hukum, *good and clean governance* misalnya, untuk pembaca yang memulai setelah membaca artikel ini akan kembali mengherankan, memunculkan banyak pertanyaan baru, seperti apa kelanjutannya, apa penjelasan keponakan SetNov dan seterusnya.

Jadi bagi kaum konstruktivis, realitas (berita) hadir dalam keadaan subyektif. Tahap pembentukan konstruksi dan tahap konfirmasi ini yang menjadi rancu sehingga, Kompas.com semakin menggiring public untuk menjadi penasaran ingin mengikuti pemberitaanya lagi. Seandainya laporan dalam kasus E-KTP Novanto oleh Kompas.com masih belum memenuhi prinsip dasar distribusi, konstruksi sosial dari media massa adalah semua informasi harus mencapai agenda media berdasarkan khalayak yang tepat. Apa yang dianggap penting oleh media menjadi penting bagi pemirsa atau pembaca. Tahap pembentukan konstruksi realitas pada pembentukan konstruksi terjadi melalui (1) konstruksi realitas pembenaran; (2) kesediaan dikonstruksi oleh media massa; dan (3) sebagai pilihan konsumtif. Tahapan Konfirmasinya. Konfirmasi adalah tahap di mana media dan publik memberikan argumen dan akuntabilitas terhadap opsi untuk berpartisipasi dalam pembentukan konstruksi. Jadi, kedua pihak mempunyai peran penting.

Kesimpulan

Ada proses konstruksi sosial dari artikel-artikel yang dikutip dari Kompas media tentang kasus E-KTP pada tahun 2017 yang membuat Novanto menjadi tersangka. Pada edisi 12/3/2018, Novanto yang kembali di persidangan memunculkan aktor baru pada kasus yang menjeratnya melalui pengakuan dirinya pada persidangan tersebut. Hanya saja media yang semestinya menjadi harian cetak ini disajikan pada bentuk elektroni,

sebagaimana ciri khas dan kaidah media elektronik yang memiliki ke khasan kekinian dan mudah dalam akses, tentu tidak luput dari kekurangan. Beberapa hal memang telah dibaca menggunakan analisis framing, yang mana isi berita menjadi sorotan pada teori ini, dibantu oleh Kerangka Framing Pan dan Kosicki menggunakan tabel yang disajikan. Maka beberapa hal dalam artikel Kompas tersebut belum memenuhi syarat dan kaidah Kode Etik Jurnalistik, misalnya ketika mengambil contoh tentang penyajian berita kasus tersebut. Proses pembingkai berita yang kurang sesuai pada penjelasan isi berita yang terperinci dapat semakin membingungkan masyarakat. Hal-hal ini menurut teori konstruksi sosial realitas belum memenuhi tiga aspek yaitu aspek sosial, aspek konstruksi, aspek realitas.

Daftar Pustaka

- Ardianto, E. (2004). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bungin, M. B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, O. (2000). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Rosdakarya.
- Effendy, O. U., & Thun Surjaman. (2002). *Dinamika komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2006). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. (2007). *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKiS.
- Kurnia, S. S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (Bandung). *Jurnalistik: Teori dan Praktek*. 2006: Remaja RosdaKarya.

- McQuail, D. (2000). *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nasution, Z. (2009). *Komunikasi Pembangunan : pengenalan teori dan penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing Analysis: An Approach to News Discourse. *Political Communication*, 55-75.
- Sobur, A. (2006). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyono, H. (2012). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.